

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan

1. Kedudukan dan Kewenangan Penunjukan TNI Aktif dikhawatirkan menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi ABRI yang telah dihapuskan sejak reformasi 1998, yaitu peran ganda militer dalam bidang keamanan dan pemerintahan. Dan Dalam sistem demokrasi modern, prinsip supremasi sipil menempatkan kekuasaan sipil di atas militer. Pejabat sipil seharusnya berasal dari jalur birokrasi sipil atau pejabat karier, bukan dari militer aktif, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau dominasi militer dalam urusan sipil.

Pengangkatan TNI Aktif sebagai Penjabat Gubernur telah menyebabkan ketidakpastian Hukum atas Peunjukan TNI aktif sebagai Plt Gubernur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, khususnya dalam pasal yang mengatur bahwa TNI harus netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh memegang jabatan sipil, kecuali setelah mengundurkan diri dari dinas militer secara resmi. Selain itu, TNI bukanlah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Dalam Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah pihak yang menjalankan tugas administratif dan eksekutif atas dasar legitimasi dari pemimpin yang sah (imam/khalifah/ulil amri). Seorang pejabat militer aktif merangkap sebagai Plt Gubernur tidak sesuai dengan prinsip ini karena kekuasaan pelaksana bisa kehilangan fokus dan menjadi tidak profesional akibat beban ganda dan potensi konflik peran.

B. Saran

Setelah penulis analisis, adapun saran terkait tema penelitian yang penulis lakukan. Menurut penulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari perbedaan interpretasi hukum, maka pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR perlu melakukan *judicial review* atau uji materil sebagai penyempurnaan terkait ketentuan pengangkatan Penjabat kepala daerah yang berasal dari Anggota TNI terutama ketentuan yang ada dalam UU Pilkada, UU ASN, dan UU TNI. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah TNI sebagai lembaga penegak hukum yang netral dan bebas dari segala kepentingan politik elit penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdillah Masyukri, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001)
- Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993)
- Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975)
- Al-mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8 (Bekasi: Darul Falah, 2017)
- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989 Masehi)
- Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Dalimunthe, Khoirunnisa. *Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Dkk Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Fockema, *Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta. 1977)
- H.S. Sunardi dan Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Global, 2006)
- Hasjmy A, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Buena 1983)
- Hasjmy A., *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Buena 1983)

- Ibn Syarif Mugar, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006)
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002)
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)
- Lombard Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006)
- M Sirajudin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011)
- Maududi Abu A'la, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, *sistem Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 1990)
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Nasution Arif, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Nawawi Juanda, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, (Makassar : Menara Intan, 2012)
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Stroink, F. A. M dan J. G Sttenbeek, *Inleiding in Het Staatsen Administratief Recht*, Samson H. D. (Tjeenk Willink Alpen en den Rijn, 1987)
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyaasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Sunarso H., and Siswanto, SH .MH. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2023)
- Taimiyah Ibnu, *Siyasah syar'iyah: etika politik Islam*, (Surabaya: risalah gusti, 1999)
- W. Widjaja A, *Administraasi Kepegawaian*, (Jakarta : Rajawali, 2006)

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Tentara Nasional Indonesia.

Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang
- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah daerah.

Undang-Undang Undang - Undang nomor 32 tahun 2004
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah.

PP Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

PP Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Daerah.

3. Jurnal/Internet

Adisasmita Rahardjo, Manajemen Pemerintahan Daerah,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Ahmad Zainal Abidin, Membangun Negara Islam (Yogyakarta:
Pustaka Iqra, 2001)

- Amin Mohamad, Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa dalam Al-Asâs fî al-Tafsîr dan Triloginya). Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2015.
- Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Anwar A, (2018). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23-46.
- Arkam Azikin, Politik hukum komponen cadangan pada sistem Pertahanan Negara. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Dalimunthe, Khoirunnisa. Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011) h. 98
- FIRMAN, PUJI NUR. Politik Hukum Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Fuad Zulfikar, PERJUANGAN PRAJURIT CPM KOMPI C BATALYON GARUDA LAMPUNG: MENGHADAPI AGRESI MILITER II BELANDA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI. PUSPOMAD & CAHAYA PUSTAKA NUSANTARA, 2024.
- Gunaryono, Nunung. Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni. Diss. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2020): 99-115.

<https://mediaindo.com/politik-dan-hukumwanti-wanti-potensi-konflik-kepentingan-panja-pilkada> di akses pada 29 Januari 2022

<https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-usulan-pejabat-tni-jadi-pj-gubernurmelanggar-uu> di akses pada 29 Januari 2022

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Kamil, Muhammad Adlan. Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Lawati, Nuryasni. Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewewenangan Gubernur di Indonesia. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998), h. 9-10

Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik, (Malang: tp, 2012).

Putra, Egip Satria Eka, et al. "Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah." UNES Law Review 6.1 (2023)

Qardawi Yusuf, Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al- Kausar, 1998).

Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2017.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyyah." Jurnal Tahkim 13.2 (2017).

Septi Nur Wijayanti Septi, "Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." Jurnal Media Hukum 23.2 (2016): 186-199.

Sopyan Yayan, Pengantar Metode Penelitian, (Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010)

Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah), (Jakarta: LIPI Press, 2005)

Syukur al-Azizi Abdul, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

Yosarie, IkhsanYosarie, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." Indonesian Journal of Religion and Society 5.2 (2023).

Zainuddin Muhadi dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori.,